

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEC. BONTANG BARAT**

**LKjIP
2022**



KATA PENGANTAR

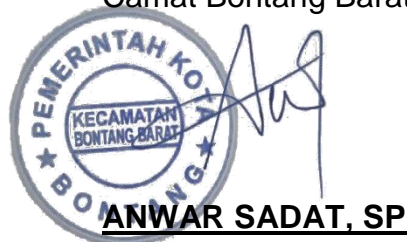
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2022.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja pada instansi. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem LKjIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja Kecamatan Bontang Barat dan capaian kinerja Kecamatan Bontang Barat yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 - 2026.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Barat.

Bontang, 24 Februari 2022

Camat Bontang Barat,



ANWAR SADAT, SP

NIP 197402192001121004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Aparatur	2
D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	4
E. Aspek Strategis Organisasi	5
F. Isu Strategis	6
G. Aset Perangkat Daerah	6
H. Keuangan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	8
B. Indikator Kinerja Utama	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
D. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan	13
E. Alokasi Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Status dan Jumlah Pegawai	3
Tabel 2	: Aset Kecamatan Bontang Barat	7
Tabel 3	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	9
Tabel 4	: Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
Tabel 5	: Target Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 6	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
Tabel 7	: Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Sasaran	15
Tabel 8	: Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	18
Tabel 9	: Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	19
Tabel 10	: Tindak Lanjut Evaluasi Sakip Tahun 2021	20
Tabel 11	: Capaian Kinerja Tahun 2022	21
Tabel 12	: Pengukuran Kinerja Organisasi Per Triwulan	22
Tabel 13	: Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020	22
Tabel 14	: Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini (akumulasi)dengan Target Jangka Menengah Organisasi (Target Akhir Renstra)	23
Tabel 15	: Evisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
Tabel 16	: Evisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan	28
Tabel 17	: Pencapaian Target Kinerja Sesuai dengan Pernyataan Kinerja Berdasarkan Program dan Kegiatan	36
Tabel 19	: Realisasi Anggaran Tahun 2022	54
Tabel 19	: Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Komposisi Jumlah Pegawai Kecamatan Bontang Barat Tahun 2022	3
Grafik 2 : Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Bontang Barat.
2. Mendorong Kecamatan Bontang Barat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Bontang Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Bontang Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

B. STRUKTUR ORGANISASI

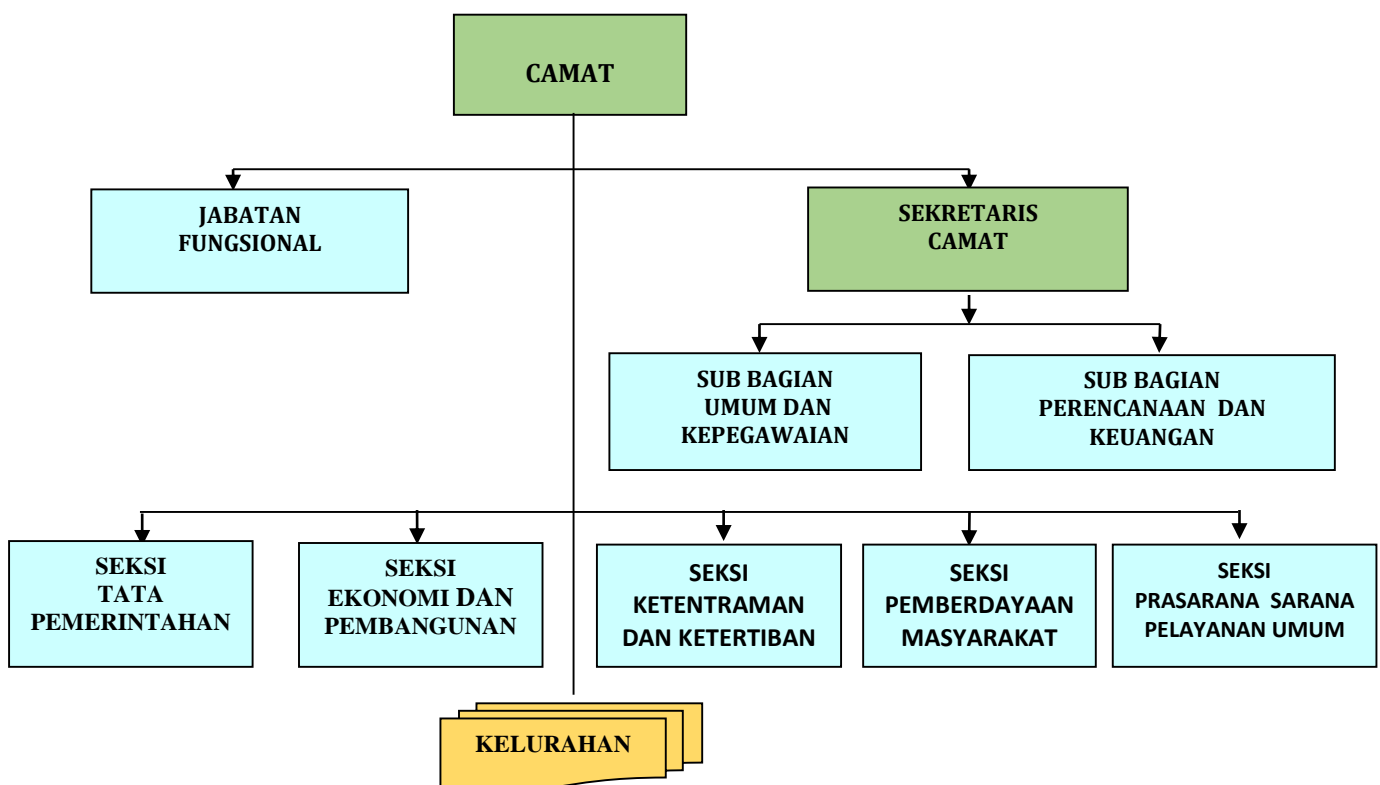
Kecamatan Bontang Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kecamatan Bontang Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Kecamatan Bontang Barat.

Kecamatan Bontang Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah Kota Bontang dengan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Lurah terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan :



C. SUMBER DAYA APARATUR

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Sumber

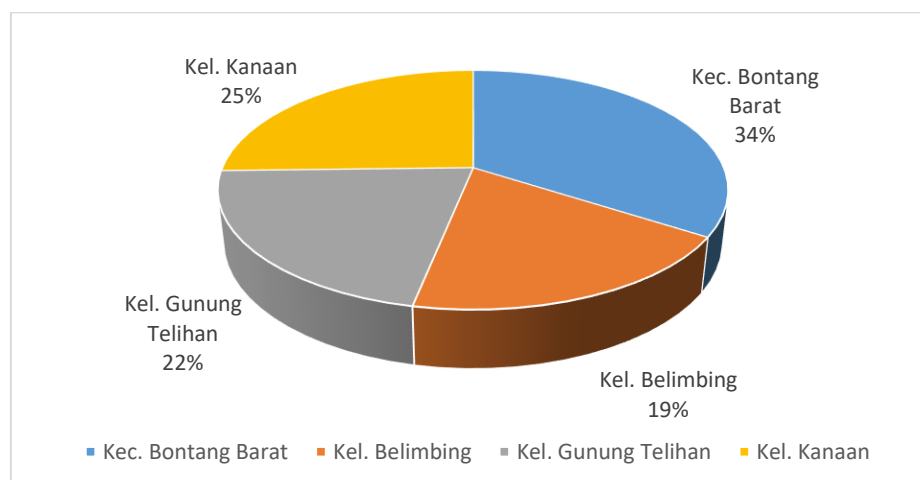
daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi pemerintah secara keseluruhan karena aparatur pemerintah merupakan subyek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Sebaik apapun suatu system tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang professional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menguatkan peran Kecamatan Bontang Barat sebagai Simpul Pelayanan Pemerintah Kota Bontang Dengan kaitan tersebut, Peningkatan kualitas sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis untuk dilaksanakan pada saat ini dan dimasa yang akan datang.

Dalam Rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan Bontang Barat mempunyai personil sebanyak 128 orang pegawai terdiri dari 62 orang dengan status pegawai negeri sipil (PNS), dan 66 orang dengan status Non PNS.

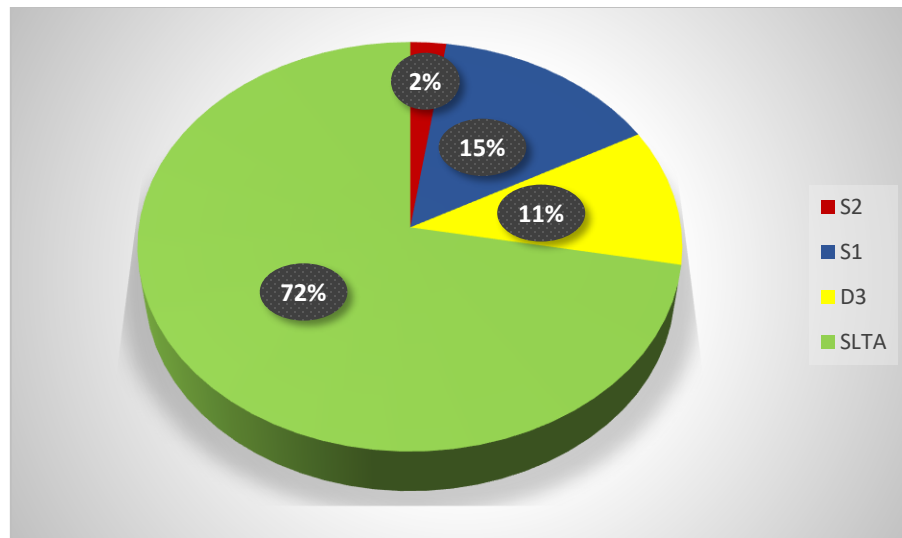
Tabel 1 Status dan Jumlah Pegawai

PNS (Golongan)				NON PNS	Tingkat Pendidikan						Jenis Kelamin	
IV	III	II	I		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Lk	Pr
2	40	20	0	66	3	19	14	92	0	0	61	67
62				66	128						128	

Grafik 1 Komposisi Jumlah Pegawai Kecamatan Bontang Barat 2022



Grafik 2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan analisis beban kerja, secara kuantitas sumber daya aparatur telah mencukupi kebutuhan namun dari segi kualitas diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pegawai yang ada di Kecamatan Bontang barat.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Kecamatan Bontang Barat adalah masih belum proposionalnya jumlah aparatur sesuai dengan Analisa jabatan dan beban kerja serta belum tersedianya tenaga Verifikator yang bertanggungjawab secara langsung. Namun Camat Bontang Barat mengingat saat ini kelurahan telah menjadi Perangkat Daerah.

D. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 menetapkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan serta prasarana sarana pelayanan umum dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya;
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penerapan dan penegakan perda dan perkada;

5. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan masyarakat;
7. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka percepatan pembangunan disegala bidang maka dibutuhkan pendalaman yang serius tentang kondisi wilayah karena pemahaman yang mendalam terhadap keadaan wilayah akan membantu dalam proses implementasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota memahami sepenuhnya bahwa Kota Bontang memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri dibanding daerah lain baik yang berada diwilayah Propinsi Kalimantan Timur maupun wilayah lainnya di seluruh Indonesia, karena itu diperlukan pendekatan pemerintah, pembangunan sosial kemasyarakatan yang khas pula. Secara relatif Kota Bontang adalah kota kawasan industri yang mengalami pertumbuhan signifikan dan telah menjadi kota industri utama di Indonesia, khususnya kawasan timur Indonesia. Keberadaan beberapa industri strategis berbasis gas alam telah menjadikan Kota Bontang sebagai kota industri yang terus mengembangkan diri menjadi kota industri gas minyak bumi dan kondensat terutama di Indonesia, hal ini telah pula dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Posisi perkembangan di atas, disadari atau tidak akan bermuara pada kemampuan daerah untuk menyediakan sumber daya manusia teknis produktif yang high quality, agar mampu mengelola dan meningkatkan pemberdayaan seluruh potensi wilayah yang mendukung pembangunan yang tengah berjalan. Sehingga satu sisi pembangunan dapat berjalan dengan baik sementara disisi lain dapat disiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi aset daerah dalam kerangka pemberdayaan potensi wilayah dimaksud.

F. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Bontang Barat, antara lain sebagai berikut:

- a. System kerja pelayanan public masih perlu penyempurnaan dengan basis elektronik;
- b. Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik antar instansi, stakeholder yang ada belum terjalin secara maksimal;
- c. Kondisi ketentraman dan ketertiban belum sepenuhnya kondusif;
- d. Prasarana dan sarana pelayanan dan perkantoran masih perlu ditingkatkan;
- e. Belum berkembangnya potensi ekonomi masyarakat;
- f. Penderita stunting masih cukup tinggi;
- g. Lembaga kemasyarakatan belum memahami perannya sebagai fasilitator di tengah masyarakat;
- h. Infrastruktur pemukiman dan fasilitas umum masih harus ditingkatkan;
- i. Kompetensi SDM tidak sejalan dengan analisa kebutuhan SDM;
- j. Implementasi pembangunan Zona Integritas cenderung bersifat procedural.

G. ASET PERANGKAT DAERAH

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bontang Barat dilengkapi dengan aset berupa tanah, bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta aset tetap. Aset tersebut sebagian besar sarana dan prasarana dalam kondisi baik namun demikian tentunya masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, namun hal tersebut diharapkan tidak mengurangi upaya maksimal dalam mendukung tercapainya visi Kota Bontang yaitu "Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab." Adapun aset yang menunjang pelayanan kepada masyarakat tergambar sebagai berikut :

Tabel 2 Aset Kecamatan Bontang Barat

No	Jenis Aset	Jumlah Nilai (Rp)
1	Tanah	3,914,761,000.00
2	Mesin dan Peralatan	4,127,671,858.00
3	Gedung dan Bangunan	20,033,029,794.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,018,199,462.00
5	Aset Tetap Lainnya	89,376,000.00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	817,172,735.00
7	Software/Aset Lainnya	14,022,038.00
8	Aset Lainnya	25,631,525.00
Jumlah Total Aset		30,039,864,412.00

H. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Barat pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Bontang. Pada tahun anggaran 2022 Kecamatan Bontang Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 30.177.653.595,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 27.085.770.796,00 dan belanja modal sebesar Rp 3.091.882.799,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Kecamatan dan 3 Kelurahan dan diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Memasuki Tahun 2021, Kecamatan Bontang Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Bontang Barat merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Bontang Barat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari evaluasi dan penyempurnaan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Kota Bontang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Bontang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Bontang Barat yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bontang

Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Bontang 2021-2026 sebagai berikut,

Tabel 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab	Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif
			Meningkatnya kondusifitas wilayah
	Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas
	Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing
			Meningkatnya pemberdayaan sosial

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Bontang Barat mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu pada sasaran:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.
2. Meningkatnya kondusifitas wilayah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.



Kecamatan Bontang Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 telah melakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 – 2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Kecamatan Bontang Barat selama 5 tahun anggaran serta Indikator Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :



Tabel 4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah Kota Bontang	Camat Bontang Barat
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Barat	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	$\frac{\text{Jumlah Pokmas yang berpartisipasi dalam program stimulan RT}}{\text{Jumlah Pokmas}} \times 100\%$	Laporan kegiatan fasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat	Camat Bontang Barat
3	Meningkanya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Nilai Zona Integritas	Nilai Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang	Laporan Hasil Monitoring Pembangunan Zona Integritas	Camat Bontang Barat
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Prosentase Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Laporan Gangguan Trantib yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan Gangguan Trantib}} \times 100\%$	Laporan Ketentraman dan Ketertiban	Camat Bontang Barat

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bontang Barat telah menetapkan target-target capaian kinerja tahunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 5 Target Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	8	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,91	87	87,1	87,2	87,3	87,4	87,4
2	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Zona Integritas	62,43	63	64,5	66	68	70	70
4	Persentase Laporan Gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Camat Bontang Barat akan mewujudkan target kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, program kegiatan dan anggaran, sebagaimana tersebut dalam ***lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2022***. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tertanggal, 14 Februari 2022.

Tabel 6 Perjanjian Kinerja tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,0
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Barat	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	Prosentase	100%
3	Meningkanya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Nilai Zona Integritas	Nilai	63
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Prosentase	100%

D. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran OPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal OPD.
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Bontang Barat Tahun 2022 yang mendukung tercapainya sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ada 5 (Lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Keterkaitan antara sasaran kinerja, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan digambarkan dalam table berikut :

Tabel 7 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Sasaran

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkanya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1. Penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kecamatan Bontang Barat	1. Penguatan manajemen perubahan 2. Penataan tata laksana 3. Penataan manajemen SDM 4. Penguatan akuntabilitas 5. Penguatan system pengawasan internal 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				



			Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kec. Bontang Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sosialisasi pelayanan publik kepada masyarakat 2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia 3. Penguatan koordinasi dan sinergi pemerintah, instansi vertikal dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public 4. Peningkatan system kerja pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pelayanan PATEN, eKTP, pertanahan, Pemilu 2. Pelatihan Front Officer 3. Pembinaan Kelurahan 4. Penyusunan dan Review SOP dan SPM 5. Koordinasi dengan stakeholder dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pelayanan publik 7. Penyusunan road map SPBE 	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan



			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kec. Bontang Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan usaha ekonomi produktif masyarakat 2. Penguatan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 3. Peningkatan infrastruktur pemukiman dan fasilitas umum 4. Peningkatan sosialisasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penguatan peran LPM, Karang Taruna, PKK, PPKBK, Forum RT sebagai fasilitator di tengah masyarakat 2. Penyaluran Dana Stimulan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pemukiman dan fasilitas umum sesuai kewenangan 4. Pembinaan kesejahteraan keluarga 5. Pembinaan PHBS, PAUD, PAAR, Pramuka, UKS dan pembinaan keagamaan 	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kec. Bontang Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 2. Peningkatan sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat 3. Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinergi pemerintah, instansi vertikal dan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan interkoneksi kamera pengawas di wilayah Kecamatan Bontang Barat 2. Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban, Sosialisasi Narkoba 3. Pembinaan dan Penguatan peran FKDM, FKUB, FPK, FKPM 4. Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan TNI/Polri dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

E. ALOKASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Bontang Barat melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 30.177.653.595,- dengan rincian Belanja Operasi Rp 27.085.770.796,- dan Modal Rp 3.091.882.799,-. Adapun Anggaran Belanja per sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 8 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	Prosentase
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat	3.809.732.516	12,62
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Barat	9.039.891.821	29,96
3	Meningkanya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	17.050.664.373	56,50
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Barat	277.364.885	0,92

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja pemerintah adalah perwujudan kebijakan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2021

Pada tahun 2021, hasil evaluasi kinerja Kecamatan Bontang Barat yang tertuang dalam surat Inspektur Kota Bontang Tanggal 28 Juli 2022, Nomor : 700/1264/ITDA.04, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Bontang Barat TA 2021. Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan predikat **BB** dan dengan nilai **70,36**. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP dilingkungan Kecamatan Bontang Barat. Terhadap evaluasi SAKIP tersebut, Kecamatan Bontang Barat direkomendasikan untuk melakukan penyempurnaan yakni:

Tabel 9 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Perencanaan Kinerja	30 %	21,76	20,65
2	Pengukuran Kinerja	30 %	16,88	22,71
3	Pelaporan Kinerja	15 %	9,13	14,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	3,50	12,50
5	Capaian Kinerja (TA. 2020) Bobot 20%		12,88	-
Nilai hasil evaluasi		100	64,14	70,36

Terhadap permasalahan yang dikemukakan, serta mempelajari hasil dokumen SAKIP Kecamatan Bontang Barat, terhadap Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2021, bahwa Kecamatan Bontang Barat agar menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat antara lain :

Tabel 10 tidak lanjut evaluasi saking TA. 2021

No	Rekomendasi	Tindaklanjut	Rencana Aksi
PERENCANAAN KINERJA			
1	Memasukkan indikator nilai Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas WBK/WBBM ke dalam dokumen perencanaan kinerja	Indikator Nilai Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas WBK/WBBM akan di masukkan ke dalam dokumen perencanaan kerja/Renstra	Melakukan review renstra
2	Mencantumkan formula perhitungan dan / atau kriteria perhitungan dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja	Dicantumkan formula perhitungan dan /atau kriteria perhitungan dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja	1. Melakukan review renstra 2. Melakukan revisi Dokumen Perjanjian Kinerja
3	Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Akan dilakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Melakukan revisi dokumen perencanaan kinerja
4	Melakukan pemantauan Rencana aksi kinerja secara berkala	Akan dilakukan pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala	Mengevaluasi kinerja secara berkala
PENGUKURAN KINERJA			
1	Menyusun manual atau kertas kerja IKU yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	Menyusun kertas kerja, pengumpulan data kinerja dan Menyusun cara mengukur indikator kinerja	Melakukan evaluasi penyusunan kertas kerja IKU yang lebih jelas serta cara mengukur Indikator kinerjanya.
2	Hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar penyusunan strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja	Dijadikan acuan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik	Akan dijadikan bahan acuan evaluasi

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Sebagai sebuah pertanggungjawaban kinerja maka LKjIP tidak hanya memuat hasil pengukuran indikator kinerja saja tapi juga harus menyajikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta penjelasan atas pencapaian kinerja tersebut

Pada setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilaksanakan, untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas.

Capaian Kinerja Kecamatan Bontang Barat tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 11 Capaian Kinerja Tahun 2022

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kec. Bontang Barat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,00	86,28	99,17%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kec. Bontang Barat	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	%	100	100	100
3	Meningkanya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kec. Bontang Barat	Nilai Zona Integritas	Nilai	63	n/a	-
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kec. Bontang Barat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

Tabel 12 Pengukuran Kinerja Organisasi per Triwulan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kec. Bontang Barat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,00	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	87,00	86,28	99,17
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kec. Bontang Barat	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	%	100	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kec. Bontang Barat	Nilai Zona Integritas	Nilai	63	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	63	n/a	n/a
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kec. Bontang Barat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	Triwulan I	100	100	100
					Triwulan II	100	100	100
					Triwulan III	100	100	100
					Triwulan IV	100	100	100

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 13 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	% Peningkatan / Penurunan tahun 2022
1.	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai	84,56	86,91	86,28	-1,73%
2	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	%	n/a	n/a	100	100%
3	Nilai Zona Integritas	Nilai	n/a	62,43	n/a	n/a
4	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0%

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 14 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (akumulasi) dengan target jangka menengah organisasi (target akhir Renstra)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d. 2022	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai	86,28	87,40	98,72
Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	%	100	100	100
Nilai Zona Integritas	Nilai	n/a	70	n/a
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja digambarkan sebagai berikut :

a. Pelayanan kepada masyarakat

Sebagai instansi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Bontang Barat berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan adalah Survey Kepuasan Masyarakat yang diadakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Timur. Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Bontang Barat. Survey ini meliputi pelayanan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban dan pelayanan dalam fasilitas pelayanan umum baik di Kecamatan maupun di Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Bontang Barat.

Pada tahun 2022 target untuk nilai SKM ditetapkan dengan nilai 87,00. Dalam upaya pencapaian target tersebut, Kecamatan Bontang Barat belum dapat melampaui target yang ditetapkan, dan memperoleh nilai 86,28 atau secara prosentase pencapaian realisasi kinerja sebesar 99,17%. Nilai SKM ini merupakan nilai rata-rata dari semua unit pelayanan di Kecamatan Bontang Barat. Namun demikian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, realisasi kinerja tersebut tergolong sangat baik dan berada pada interval nilai realisasi kinerja $91 \leq 100$

Namun demikian jika dibandingkan dengan pencapaian nilai SKM pada tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 0,63 poin atau 1,73% persen, dimana

pada tahun 2021 nilai SKM sebesar 86,91 dan tahun 2022 sebesar 86,28. Penurunan tersebut tidak serta merta dikatakan sebagai penurunan kinerja pelayanan karena penurunan ini tidak berpengaruh secara significant dalam mutu pelayanan di Kecamatan Bontang Barat, dan mutu pelayanan di Kecamatan Bontang Barat berada dalam kategori Baik atau "B" sesuai dengan Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017. Selengkapnya Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Sesuai Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2022, terdapat beberapa rekomendasi untuk dilakukan perbaikan pada tahun 2023 yaitu :

- Terdapat unit kerja yang belum memiliki standar operasional dan prosedur serta standar pelayanan minimal yang dipublikasikan baik secara offline maupun secara online
- Perlunya peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu layanan dan kepuasan masyarakat
- Peningkatan mutu pelayanan melalui digitalisasi sistem pelayanan

b. Pemberdayaan masyarakat

Salah satu program prioritas Pemerintah Kota Bontang adalah pemberian stimulus untuk masyarakat dalam usaha peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa salah satu fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam mengukur pemberdayaan masyarakat adalah prosentase partisipasi kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program stimulan RT.

Dalam melaksanakan Program Stimulan RT, Kecamatan Bontang Barat menggunakan metode pengadaan swakelola type 4, dimana kegiatan yang dilaksanakan berasal dari usulan masyarakat, serta dilaksanakan dan diawasi juga

oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Pada tahun 2022 terdapat 22 Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdapat di wilayah Kecamatan Bontang Barat dengan sebaran 6 (enam) Pokmas di Kelurahan Belimbing, 5 (lima) Pokmas di Kelurahan Gunung Telihan dan 11 (sebelas) Pokmas di Kelurahan Kanaan.

Dalam pelaksanaan Program Stimulan RT tahun 2022, semua Pokmas di wilayah Kecamatan Bontang Barat berpartisipasi aktif dan bertanggungjawab langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan, sehingga diharapkan dampaknya kegiatan ini dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Yang menjadi catatan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah jumlah anggaran yang belum sebanding dengan aspirasi masyarakat, sehingga outcome yang diharapkan dari kegiatan ini belum maksimal. Terkait dengan besaran alokasi anggaran tentunya memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi yang terkait, namun secara tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Barat telah melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan baik.

c. Pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas pembangunan zona integritas adalah penilaian dan evaluasi pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang.

Pada tahun 2021 Kecamatan Bontang Barat memperoleh nilai 62,43 atau predikat "C". Terdapat beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2022, namun hasil monitoring pembangunan zona integritas untuk tahun 2022 belum dilakukan sehingga peningkatan/penurunan nilai zona integritas belum dapat diketahui.

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan merupakan turunan dari sasaran RPJMD 2021-2026 Kota Bontang yaitu meningkatkan kondusifitas wilayah. Indikator yang

dipakai dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bontang Barat adalah tingkat penyelesaian laporan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan.

Pada tahun 2022 terdapat beberapa laporan/kasus yang terjadi di Kecamatan Bontang Barat diantaranya kasus sengketa lahan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, kaributan antar remaja, pelanggaran administrasi kependudukan, kesalahpahaman antar individu maupun antar kelompok dan lain sebagainya. Namun demikian potensi-potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diredam sedini mungkin dan dilakukan penyelesaian secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator-indikator tersebut

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan sebagai tabel berikut :



Tabel 15 Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase	Anggaran	Realisasi	Prosentase	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai	87	86,28	99,17	3.809.732.516	3.809.732.516	95,40	3,77
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Barat	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	Persen	100	100	100	9.039.891.821	9.039.891.821	96,85	3,15
3	Meningkanya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Nilai Zona Integritas	Nilai	63	n/a	n/a	17.050.664.373	17.050.664.373	96,51	n/a
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	277.364.885	277.364.885	95,11	4,89



Tabel 16 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran	Efisiensi Anggaran (%)
KECAMATAN BONTANG BARAT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.050.664.373,00	16.456.327.151,00	96,51	100,00	594.337.222,00	3,49
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.396.200,00	3.387.346,00	99,74	100,00	8.854,00	0,26
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.698.100,00	1.698.100,00	100,00	100,00	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.698.100,00	1.689.246,00	99,48	100,00	8.854,00	0,52
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.562.138.398,00	10.141.117.694,00	96,01	100,00	421.020.704,00	3,99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.559.602.048,00	10.138.581.344,00	96,01	100,00	421.020.704,00	3,99
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	845.450,00	845.450,00	100,00	100,00	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	845.450,00	845.450,00	100,00	100,00	-	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	845.450,00	845.450,00	100,00	100,00	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	495.406.468,00	477.707.621,00	96,43	100,00	17.698.847,00	3,57
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	144.256.468,00	129.405.300,00	89,71	100,00	14.851.168,00	10,29
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	351.150.000,00	348.302.321,00	99,19	100,00	2.847.679,00	0,81
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.111.577.190,00	1.085.923.378,00	97,69	100,00	25.653.812,00	2,31
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.241.440,00	14.481.293,00	95,01	100,00	760.147,00	4,99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	486.231.076,00	480.943.184,00	98,91	100,00	5.287.892,00	1,09
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.856.044,00	51.471.517,00	85,99	100,00	8.384.527,00	14,01
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.241.130,00	31.438.514,00	86,75	100,00	4.802.616,00	13,25
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.117.500,00	7.117.500,00	100,00	100,00	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.890.000,00	500.471.370,00	98,73	100,00	6.418.630,00	1,27



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran	Efisiensi Anggaran (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.671.092,00	105.981.882,00	95,76	100,00	4.689.210,00	4,24
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.773.364,00	35.105.582,00	90,54	100,00	3.667.782,00	9,46
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.897.728,00	70.876.300,00	98,58	100,00	1.021.428,00	1,42
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.142.977.244,00	4.022.182.864,00	97,08	100,00	120.794.380,00	2,92
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	100,00	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000,00	204.282.783,00	88,82	100,00	25.717.217,00	11,18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.912.977.244,00	3.817.900.081,00	97,57	100,00	95.077.163,00	2,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.497.781,00	620.026.366,00	99,28	100,00	4.471.415,00	0,72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	229.779.100,00	229.482.850,00	99,87	100,00	296.250,00	0,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.450.000,00	5.922.752,00	79,50	100,00	1.527.248,00	20,50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.468.681,00	325.392.738,00	99,37	100,00	2.075.943,00	0,63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.800.000,00	59.228.026,00	99,04	100,00	571.974,00	0,96
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	924.516.097,00	833.456.234,00	90,15	100,00	91.059.863,00	9,85
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	487.628.370,00	472.847.732,00	96,97	100,00	14.780.638,00	3,03
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	418.901.794,00	404.121.156,00	96,47	100,00	14.780.638,00	3,53
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	68.726.576,00	68.726.576,00	100,00	100,00	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	394.415.227,00	318.136.002,00	80,66	100,00	76.279.225,00	19,34
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	31.003.454,00	29.403.454,00	94,84	100,00	1.600.000,00	5,16
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	282.120.868,00	277.605.278,00	98,40	100,00	4.515.590,00	1,60
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.290.905,00	11.127.270,00	13,69	100,00	70.163.635,00	86,31



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran	Efisiensi Anggaran (%)
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	42.472.500,00	42.472.500,00	100,00	100,00	-	-
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	42.472.500,00	42.472.500,00	100,00	100,00	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	603.349.600,00	569.199.048,00	94,34	100,00	34.150.552,00	5,66
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	603.349.600,00	569.199.048,00	94,34	100,00	34.150.552,00	5,66
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	603.349.600,00	569.199.048,00	94,34	100,00	34.150.552,00	5,66
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.972.635,00	20.794.850,00	99,15	100,00	177.785,00	0,85
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.972.635,00	20.794.850,00	99,15	100,00	177.785,00	0,85
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.972.635,00	20.794.850,00	99,15	100,00	177.785,00	0,85
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	105.702.650,00	94.618.992,00	89,51	100,00	11.083.658,00	10,49
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.702.650,00	94.618.992,00	89,51	100,00	11.083.658,00	10,49
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	105.702.650,00	94.618.992,00	89,51	100,00	11.083.658,00	10,49
KELURAHAN KANAAN						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	798.778.426,00	783.211.912,00	98,05	100,00	15.566.514,00	1,95
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	798.778.426,00	783.211.912,00	98,05	100,00	15.566.514,00	1,95
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	798.778.426,00	783.211.912,00	98,05	100,00	15.566.514,00	1,95
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	949.138.762,00	889.001.010,00	93,66	100,00	60.137.752,00	6,34
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	73.706.008,00	39.087.550,00	53,03	100,00	34.618.458,00	46,97
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	13.500.000,00	13.012.550,00	96,39	100,00	487.450,00	3,61
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	100,00	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.206.008,00	26.075.000,00	43,31	100,00	34.131.008,00	56,69



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran	Efisiensi Anggaran (%)
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	42.472.500,00	42.472.500,00	100,00	100,00	-	-
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	42.472.500,00	42.472.500,00	100,00	100,00	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	603.349.600,00	569.199.048,00	94,34	100,00	34.150.552,00	5,66
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	603.349.600,00	569.199.048,00	94,34	100,00	34.150.552,00	5,66
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	603.349.600,00	569.199.048,00	94,34	100,00	34.150.552,00	5,66
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.972.635,00	20.794.850,00	99,15	100,00	177.785,00	0,85
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.972.635,00	20.794.850,00	99,15	100,00	177.785,00	0,85
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.972.635,00	20.794.850,00	99,15	100,00	177.785,00	0,85
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	105.702.650,00	94.618.992,00	89,51	100,00	11.083.658,00	10,49
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.702.650,00	94.618.992,00	89,51	100,00	11.083.658,00	10,49
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	105.702.650,00	94.618.992,00	89,51	100,00	11.083.658,00	10,49
KELURAHAN KANAAN						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	798.778.426,00	783.211.912,00	98,05	100,00	15.566.514,00	1,95
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	798.778.426,00	783.211.912,00	98,05	100,00	15.566.514,00	1,95
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	798.778.426,00	783.211.912,00	98,05	100,00	15.566.514,00	1,95
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	949.138.762,00	889.001.010,00	93,66	100,00	60.137.752,00	6,34
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	73.706.008,00	39.087.550,00	53,03	100,00	34.618.458,00	46,97
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	13.500.000,00	13.012.550,00	96,39	100,00	487.450,00	3,61
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	100,00	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.206.008,00	26.075.000,00	43,31	100,00	34.131.008,00	56,69



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran	Efisiensi Anggaran (%)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	875.432.754,00	849.913.460,00	97,08	100,00	25.519.294,00	2,92
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	507.432.904,00	491.667.200,00	96,89	100,00	15.765.704,00	3,11
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	367.999.850,00	358.246.260,00	97,35	100,00	9.753.590,00	2,65
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00	-	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00	-	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	13.317.780,00	88,79	100,00	1.682.220,00	11,21
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	13.317.780,00	88,79	100,00	1.682.220,00	11,21
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000,00	13.317.780,00	88,79	100,00	1.682.220,00	11,21
KELURAHAN GUNUNG TELIHAN						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	549.206.628,00	534.674.864,00	97,35	100,00	14.531.764,00	2,65
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	549.206.628,00	534.674.864,00	97,35	100,00	14.531.764,00	2,65
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	549.206.628,00	534.674.864,00	97,35	100,00	14.531.764,00	2,65
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.708.804.450,00	2.603.541.408,00	96,11	100,00	105.263.042,00	3,89
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.096.199.950,00	1.084.776.708,00	98,96	100,00	11.423.242,00	1,04
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	15.492.150,00	15.394.050,00	99,37	100,00	98.100,00	0,63
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	751.147.800,00	745.025.043,00	99,18	100,00	6.122.757,00	0,82
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	329.560.000,00	324.357.615,00	98,42	100,00	5.202.385,00	1,58



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran	Efisiensi Anggaran (%)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.612.604.500,00	1.518.764.700,00	94,18	100,00	93.839.800,00	5,82
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	805.784.500,00	805.241.200,00	99,93	100,00	543.300,00	0,07
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	806.820.000,00	713.523.500,00	88,44	100,00	93.296.500,00	11,56
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00	-	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00	-	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00	19.913.250,00	99,57	100,00	86.750,00	0,43
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	19.913.250,00	99,57	100,00	86.750,00	0,43
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.000.000,00	19.913.250,00	99,57	100,00	86.750,00	0,43
KELURAHAN BELIMBING						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.537.231.365,00	1.483.062.096,00	96,48	100,00	54.169.269,00	3,52
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.537.231.365,00	1.483.062.096,00	96,48	100,00	54.169.269,00	3,52
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.537.231.365,00	1.483.062.096,00	96,48	100,00	54.169.269,00	3,52
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.778.599.009,00	4.693.614.093,00	98,22	100,00	84.984.916,00	1,78
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.139.830.419,00	2.088.202.799,00	97,59	100,00	51.627.620,00	2,41
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14.500.000,00	14.156.900,00	97,63	100,00	343.100,00	2,37
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.627.911.629,00	1.603.079.837,00	98,47	100,00	24.831.792,00	1,53
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	497.418.790,00	470.966.062,00	94,68	100,00	26.452.728,00	5,32



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran	Efisiensi Anggaran (%)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.638.768.590,00	2.605.411.294,00	98,74	100,00	33.357.296,00	1,26
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.298.324.400,00	1.282.953.410,00	98,82	100,00	15.370.990,00	1,18
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.340.444.190,00	1.322.457.884,00	98,66	100,00	17.986.306,00	1,34
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.689.600,00	67.156.800,00	99,21	100,00	532.800,00	0,79
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	67.689.600,00	67.156.800,00	99,21	100,00	532.800,00	0,79
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	67.689.600,00	67.156.800,00	99,21	100,00	532.800,00	0,79
JUMLAH	30.177.653.595,00	29.109.889.488,00	96,46	100,00	1.067.764.107,00	3,54

Berdasarkan table 16 dan 17 di atas Kecamatan Bontang Barat telah melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian target kinerja. Hal itu terlihat dari realisasi kinerja yang lebih besar dari penggunaan sumber daya. Demikian juga dengan penggunaan anggaran, dimana Kecamatan Bontang Barat dapat melakukan efisiensi anggaran pada hampir seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan, tanpa mengurangi ketercapaian target kinerja.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kecamatan Bontang Barat pada tahun 2022 melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan dan dan 37 Sub Kegiatan. Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diarahkan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, dan semua target-target kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan dan dicapai. Secara singkat program-program yang mendukung pencapaian target kinerja sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat" dan "Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas"
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat" dan "Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas"
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk mendukung sasaran "Meningkatnya pemberdayaan masyarakat"
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum untuk mendukung sasaran "Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat"

Selengkapnya realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 17 pencapaian target kinerja sesuai dengan Pernyataan Kinerja berdasarkan program dan kegiatan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) PERMENDAGRI	Target Kinerja		Realisasi Kinerja			Presentase Realisasi Kinerja	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4		5			6	7	
KECAMATAN BONTANG BARAT					30.177.653.595			29.109.888.488		Kec.Bontang Barat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	17.050.664.373	100	%	16.456.327.151	100%	Kec.Bontang Barat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	3.396.200	4	Dokumen	3.387.346	100%	Kec.Bontang Barat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	1.698.100	2	Dokumen	1.698.100	100%	Kec.Bontang Barat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	Dokumen	1.698.100	2	Dokumen	1.698.100	100%	Kec.Bontang Barat



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	Unit	229.779.100	17	Unit	229.482.850	100%	Kec.Bontang Barat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	Unit	7.450.000	17	Unit	5.922.752	100%	Kec.Bontang Barat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Gedung	327.468.681	2	Gedung	325.392.738	100%	Kec.Bontang Barat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Jenis	59.800.000	5	Jenis	59.228.026	100%	Kec.Bontang Barat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Kegiatan	68.726.576	2	Kegiatan	68.726.576	100%	Kec.Bontang Barat



Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	3	Urusan	394.415.227	3	Urusan	318.136.002	100%	Kec.Bontang Barat
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Peserta	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	150	Orang	31.003.454	150	Orang	29.403.454	100%	Kec.Bontang Barat
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Yang Diberikan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Layanan	282.120.868	4	Layanan	277.605.278	100%	Kec.Bontang Barat
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan Yang Dibina	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Kelurahan	81.290.905	3	Kelurahan	11.127.270	100%	Kec.Bontang Barat



Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Kegiatan	42.472.500	1	Kegiatan	42.472.500	100%	Kec.Bontang Barat
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	Kali	42.472.500	4	Kali	42.472.500	100%	Kec.Bontang Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100	%	603.349.600	100	%	569.199.048	100%	Kec.Bontang Barat
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Kegiatan	603.349.600	1	Kegiatan	569.199.048	100%	Kec.Bontang Barat
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga	603.349.600	3	Lembaga	569.199.048	100%	Kec.Bontang Barat



PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	%	20.972.635	100	%	20.794.850	100%	Kec.Bontang Barat
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi	Tingkat penerapan dan penegakan peraturan daerah	1	Kegiatan	20.972.635	1	Kegiatan	20.794.850	100%	Kec.Bontang Barat
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	Kegiatan	20.972.635	2	Kegiatan	20.794.850	100%	Kec.Bontang Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	%	105.702.650	100	%	94.618.992	100%	Kec.Bontang Barat
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1	Urusan	105.702.650	1	Urusan	94.618.992	100%	Kec.Bontang Barat



Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2	Kegiatan	105.702.650	2	Kegiatan	94.618.992	100%	Kec.Bontang Barat
KELURAHAN KANAAN					1.771.917.188			1.696.212.922	100%	Kelurahan Kanaan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Sesuai SOP	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100	%	798.778.426	100	%	783.211.912	100%	Kelurahan Kanaan



Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan	1	Urusan	798.778.426	1	Urusan	783.211.912	100%	Kelurahan Kanaan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan yang diselenggarakan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Layanan	798.778.426	4	Layanan	783.211.912	100%	Kelurahan Kanaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100	%	949.138.762	100	%	889.001.010	100%	Kelurahan Kanaan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	3	Kegiatan	73.706.008	3	Kegiatan	39.087.550	100%	Kelurahan Kanaan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Peserta Musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	75	Orang	13.500.000	75	Orang	13.012.550	100%	Kelurahan Kanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Kegiatan	-	12	Kegiatan	-	100%	Kelurahan Kanaan



Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Kegiatan	60.206.008	4	Kegiatan	26.075.000	100%	Kelurahan Kanaan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2	Kegiatan	875.432.754	2	Kegiatan	849.913.460	100%	Kelurahan Kanaan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	Lembaga	507.432.904	2	Lembaga	491.667.200	100%	Kelurahan Kanaan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Kegiatan	367.999.850	12	Kegiatan	358.246.260	100%	Kelurahan Kanaan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	%	24.000.000	100	%	24.000.000	100%	Kelurahan Kanaan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang Dilakukan	Terpenuhinya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteriban umum	1	Koordinasi	24.000.000	1	Koordinasi	24.000.000	100%	Kelurahan Kanaan



Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Kegiatan	24.000.000	1	Kegiatan	24.000.000	100%	Kelurahan Kanaan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	%	15.000.000	100	%	13.317.780	100%	Kelurahan Kanaan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Urusan	15.000.000	1	Urusan	13.317.780	100%	Kelurahan Kanaan



Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	2	Kegiatan	15.000.000	2	Kegiatan	13.317.780	100%	Kelurahan Kanaan
KELURAHAN GUNUNG TELIHAN					3.302.011.078			3.182.129.522	100%	Kelurahan Gn. Telihan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Sesuai SOP	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100	%	549.206.628	100	%	534.674.864	100%	Kelurahan Gn. Telihan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan	1	Urusan	549.206.628	1	Urusan	534.674.864	100%	Kelurahan Gn. Telihan



Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Yang Diselenggarakan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Layanan	549.206.628	4	Layanan	534.674.864	100%	Kelurahan Gn. Telihan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100	%	2.708.804.450	100	%	2.603.541.408	100%	Kelurahan Gn. Telihan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	3	Kegiatan	1.096.199.950	3	Kegiatan	1.084.776.708	100%	Kelurahan Gn. Telihan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	132	Orang	15.492.150	132	Orang	15.394.050	100%	Kelurahan Gn. Telihan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pemasangan Paving Block	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Kegiatan	751.147.800	2	Kegiatan	745.025.043	100%	Kelurahan Gn. Telihan
	Jumlah Perbaikan Drainase		1	Kegiatan		1	Kegiatan	-	100%	
	Jumlah Renovasi Jembatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan	-	100%	
	Jumlah Semenisasi Jalan		1	Kegiatan		1	Kegiatan	-	100%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Kegiatan	329.560.000	4	Kegiatan	324.357.615	100%	Kelurahan Gn. Telihan
	Kendaraan Roda Tiga		1	Unit		1	Unit	-	100%	
	Perlengkapan Pos Security		1	Paket		1	Paket	-	100%	



Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2	Kegiatan	1.612.604.500	2	Kegiatan	1.518.764.700	100%	Kelurahan Gn. Telihan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	Lembaga	805.784.500	2	Lembaga	805.241.200	100%	Kelurahan Gn. Telihan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30	Kegiatan	806.820.000	30	Kegiatan	713.523.500	100%	Kelurahan Gn. Telihan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	%	24.000.000	100	%	24.000.000	100%	Kelurahan Gn. Telihan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang Dilakukan	Terpenuhinya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteriban umum	1	Kegiatan	24.000.000	1	Kegiatan	24.000.000	100%	Kelurahan Gn. Telihan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Kegiatan	24.000.000	1	Kegiatan	24.000.000	100%	Kelurahan Gn. Telihan



PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	%	20.000.000	100	%	19.913.250	100%	Kelurahan Gn. Telihan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Urusan	20.000.000	1	Urusan	19.913.250	100%	Kelurahan Gn. Telihan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2	Kegiatan	20.000.000	2	Kegiatan	19.913.250	100%	Kelurahan Gn. Telihan



KELURAHAN BELIMBING					6.383.519.974			6.243.832.989	100%	Kelurahan Belimbing
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Sesuai SOP	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100	%	1.537.231.365	100	%	1.483.062.096	100%	Kelurahan Belimbing
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan	1	Urusan	1.537.231.365	1	Urusan	1.483.062.096	100%	Kelurahan Belimbing
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan yang Diselenggarakan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Layanan	1.537.231.365	6	Layanan	1.483.062.096	100%	Kelurahan Belimbing
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100	%	4.778.599.009	100	%	4.693.614.093	100%	Kelurahan Belimbing
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	3	Kegiatan	2.139.830.419	3	Kegiatan	2.088.202.799	100%	Kelurahan Belimbing



Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	100	Orang	14.500.000	100	Orang	14.156.900	100%	Kelurahan Belimbing
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah drainase yang direhab	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Drainase	1.627.911.629	2	Drainase	1.603.079.837	100%	Kelurahan Belimbing
	Jumlah gapura yang dibangun		1	Gapura		1	Gapura	-	100%	
	Jumlah Gedung yang Direhab		3	Gedung		3	Gedung	-	100%	
	Jumlah Lampu Gapura yang Diadakan		1	Unit		1	Unit	-	100%	



	Jumlah Pagar yang Diadakan		1	Pagar		1	Pagar	-	100%	
	Jumlah Plang Nama Jalan		130	Unit		130	Unit	-	100%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis barang yang diadakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Jenis	497.418.790	7	Jenis	470.966.062	100%	Kelurahan Belimbing
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4	Kegiatan		4	Kegiatan	-	100%	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2	Kegiatan	2.638.768.590	2	Kegiatan	2.605.411.294	100%	Kelurahan Belimbing
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	Lembaga	1.298.324.400	2	Lembaga	1.282.953.410	100%	Kelurahan Belimbing



Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	51	Kegiatan	1.340.444.190	51	Kegiatan	1.322.457.884	100%	Kelurahan Belimbing
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	%	67.689.600	100	%	67.156.800	100%	Kelurahan Belimbing
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang Dilakukan	Terpenuhinya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteriban umum	1	Kegiatan	67.689.600	1	Kegiatan	67.156.800	100%	Kelurahan Belimbing
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Kegiatan	67.689.600	1	Kegiatan	67.156.800	100%	Kelurahan Belimbing
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	%	-	100	%	-	100%	Kelurahan Belimbing
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Urusan	-	1	Urusan	-	100%	Kelurahan Belimbing



Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2	Kegiatan	-	2	Kegiatan	-	100%	Kelurahan Belimbing
---	--	---	---	----------	---	---	----------	---	------	---------------------

B. REALISASI ANGGARAN

Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi/organisasi, merupakan aspek penting karena menunjang pelaksanaan segala kegiatan yang direncanakan. Oleh karena itu, aspek keuangan juga harus dilaporkan kinerjanya sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kecamatan Bontang Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp 30.177.653.595,00** dan realisasi anggarannya sebesar **Rp. 29.109.889.488,00** dengan rincian dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 18 Realisasi anggaran Tahun 2022

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rp 30.177.653.595,00	Rp 29.109.889.488,00
	Jumlah	Rp 30.177.653.595,00	Rp 29.109.889.488,00
	Sisa Lebih		Rp 1.067.764.107,00

Sisa lebih anggaran tahun 2022 sebagian besar didominasi oleh belanja pegawai belanja tidak langsung dan belanja barang dan jasa untuk belanja langsung.

1. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut

ini :

Tabel 19 Realisasi anggaran per program dan kegiatan

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD-2	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6 = 3 - 4
7	UNSUR KEWILAYAHAN	30.177.653.595,00	29.109.889.488,00	96,46	1.067.764.107,00
7.01	KECAMATAN	30.177.653.595,00	29.109.889.488,00	96,46	1.067.764.107,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	KECAMATAN BONTANG BARAT	30.177.653.595,00	29.109.889.488,00	96,46	1.067.764.107,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.050.664.373,00	16.456.327.151,00	96,51	594.337.222,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.396.200,00	3.387.346,00	99,74	8.854,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.698.100,00	1.698.100,00	100,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.698.100,00	1.689.246,00	99,48	8.854,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.562.138.398,00	10.141.117.694,00	96,01	421.020.704,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.559.602.048,00	10.138.581.344,00	96,01	421.020.704,00
7.01.01.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	845.450,00	845.450,00	100,00	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	845.450,00	845.450,00	100,00	0,00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	845.450,00	845.450,00	100,00	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	495.406.468,00	477.707.621,00	96,43	17.698.847,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	144.256.468,00	129.405.300,00	89,71	14.851.168,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	351.150.000,00	348.302.321,00	99,19	2.847.679,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.111.577.190,00	1.085.923.378,00	97,69	25.653.812,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.241.440,00	14.481.293,00	95,01	760.147,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	486.231.076,00	480.943.184,00	98,91	5.287.892,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.856.044,00	51.471.517,00	85,99	8.384.527,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.241.130,00	31.438.514,00	86,75	4.802.616,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.117.500,00	7.117.500,00	100,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.890.000,00	500.471.370,00	98,73	6.418.630,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.671.092,00	105.981.882,00	95,76	4.689.210,00
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.773.364,00	35.105.582,00	90,54	3.667.782,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.897.728,00	70.876.300,00	98,58	1.021.428,00

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD-2	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	$\frac{5}{4/3 \times 100}$	6 = 3 - 4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.142.977.244,00	4.022.182.864,00	97,08	120.794.380,00
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000,00	204.282.783,00	88,82	25.717.217,00
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.912.977.244,00	3.817.900.081,00	97,57	95.077.163,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.497.781,00	620.026.366,00	99,28	4.471.415,00
7.01.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	229.779.100,00	229.482.850,00	99,87	296.250,00
7.01.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.450.000,00	5.922.752,00	79,50	1.527.248,00
7.01.01.2.09.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.468.681,00	325.392.738,00	99,37	2.075.943,00
7.01.01.2.09.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.800.000,00	59.228.026,00	99,04	571.974,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	924.516.097,00	833.456.234,00	90,15	91.059.863,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	487.628.370,00	472.847.732,00	96,97	14.780.638,00
7.01.02.2.01.0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	418.901.794,00	404.121.156,00	96,47	14.780.638,00
7.01.02.2.01.0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	68.726.576,00	68.726.576,00	100,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	394.415.227,00	318.136.002,00	80,66	76.279.225,00
7.01.02.2.02.0	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	31.003.454,00	29.403.454,00	94,84	1.600.000,00
7.01.02.2.02.0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	282.120.868,00	277.605.278,00	98,40	4.515.590,00
7.01.02.2.02.0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.290.905,00	11.127.270,00	13,69	70.163.635,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	42.472.500,00	42.472.500,00	100,00	0,00
7.01.02.2.03.0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	42.472.500,00	42.472.500,00	100,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	603.349.600,00	569.199.048,00	94,34	34.150.552,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	603.349.600,00	569.199.048,00	94,34	34.150.552,00
7.01.03.2.03.0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	603.349.600,00	569.199.048,00	94,34	34.150.552,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.972.635,00	20.794.850,00	99,15	177.785,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.972.635,00	20.794.850,00	99,15	177.785,00
7.01.04.2.02.0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.972.635,00	20.794.850,00	99,15	177.785,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	105.702.650,00	94.618.992,00	89,51	11.083.658,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.702.650,00	94.618.992,00	89,51	11.083.658,00
7.01.05.2.01.0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	105.702.650,00	94.618.992,00	89,51	11.083.658,00

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD-2	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6 = 3 - 4
7.01.0.00.0.00.30.0001	KELURAHAN KANAAN	1.786.917.188,00	1.709.530.702,00	95,67	77.386.486,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	798.778.426,00	783.211.912,00	98,05	15.566.514,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	798.778.426,00	783.211.912,00	98,05	15.566.514,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	798.778.426,00	783.211.912,00	98,05	15.566.514,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	949.138.762,00	889.001.010,00	93,66	60.137.752,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	73.706.008,00	39.087.550,00	53,03	34.618.458,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	13.500.000,00	13.012.550,00	96,39	487.450,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.206.008,00	26.075.000,00	43,31	34.131.008,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	875.432.754,00	849.913.460,00	97,08	25.519.294,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	507.432.904,00	491.667.200,00	96,89	15.765.704,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	367.999.850,00	358.246.260,00	97,35	9.753.590,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	13.317.780,00	88,79	1.682.220,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	13.317.780,00	88,79	1.682.220,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000,00	13.317.780,00	88,79	1.682.220,00
7.01.0.00.0.00.30.0002	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN	3.302.011.078,00	3.182.129.522,00	96,37	119.881.556,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	549.206.628,00	534.674.864,00	97,35	14.531.764,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	549.206.628,00	534.674.864,00	97,35	14.531.764,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	549.206.628,00	534.674.864,00	97,35	14.531.764,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.708.804.450,00	2.603.541.408,00	96,11	105.263.042,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.096.199.950,00	1.084.776.708,00	98,96	11.423.242,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	15.492.150,00	15.394.050,00	99,37	98.100,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	751.147.800,00	745.025.043,00	99,18	6.122.757,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	329.560.000,00	324.357.615,00	98,42	5.202.385,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.612.604.500,00	1.518.764.700,00	94,18	93.839.800,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	805.784.500,00	805.241.200,00	99,93	543.300,00

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD-2	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6 = 3 - 4
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	806.820.000,00	713.523.500,00	88,44	93.296.500,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00	19.913.250,00	99,57	86.750,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	19.913.250,00	99,57	86.750,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.000.000,00	19.913.250,00	99,57	86.750,00
7.01.0.00.0.00.30.0003	KELURAHAN BELIMBING	6.383.519.974,00	6.243.832.989,00	97,81	139.686.985,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.537.231.365,00	1.483.062.096,00	96,48	54.169.269,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.537.231.365,00	1.483.062.096,00	96,48	54.169.269,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.537.231.365,00	1.483.062.096,00	96,48	54.169.269,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.778.599.009,00	4.693.614.093,00	98,22	84.984.916,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.139.830.419,00	2.088.202.799,00	97,59	51.627.620,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14.500.000,00	14.156.900,00	97,63	343.100,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.627.911.629,00	1.603.079.837,00	98,47	24.831.792,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	497.418.790,00	470.966.062,00	94,68	26.452.728,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.638.768.590,00	2.605.411.294,00	98,74	33.357.296,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.298.324.400,00	1.282.953.410,00	98,82	15.370.990,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.340.444.190,00	1.322.457.884,00	98,66	17.986.306,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.689.600,00	67.156.800,00	99,21	532.800,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	67.689.600,00	67.156.800,00	99,21	532.800,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	67.689.600,00	67.156.800,00	99,21	532.800,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	30.177.653.595,00	29.109.889.488,00	96,46	1.067.764.107,00

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2022 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan dalam Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian pelaporan LKjIP ini merupakan sarana bagi Kecamatan Bontang Barat untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bontang Barat secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilaksanakan. Peningkatan kinerja di Kecamatan Bontang Barat tetap harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Capaian Realisasi Fisik Kegiatan Kecamatan Bontang Barat pada Tahun 2022 sebesar 100%. Secara umum Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah melaksanakan kegiatan rutin maupun pembangunan dengan **Capaian Realisasi Anggaran** sebesar Rp. **29.109.889.488,00** (*dua puluh sembilan milyar seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau sebesar **96,46%** dari total **Pagu Anggaran** sebesar Rp. **30.177.653.595,00** (*tiga puluh milyar serratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah*).

B. SARAN

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian target Kecamatan Bontang Barat ke depan berupaya untuk mengatasi masalah serta kendala yang ada, dengan kiat pemecahan sebagai berikut:

- 1 Agar visi dan misi serta program - program yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, maka Kecamatan Bontang Barat akan lebih meningkatkan ketelitian

dalam perencanaan sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan kesatuan yang terintegrasi, bersinergi dan berkesinambungan;

- 2 Agar kinerja personil pengelola kegiatan dapat ditingkatkan maka disarankan bimbingan teknis baik dibidang keuangan maupun administrasi kegiatan dari Pemerintah Kota Bontang secara rutin
- 3 Agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan maka pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kota perlu ditingkatkan, selain itu diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan guna meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bontang Barat

Bontang, 16 Januari 2023

Camat Bontang Barat,

ANWAR SADAT, SP

NIP 197402192001121004